

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ghoffar Abdul, *“Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju”*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Ardial, *“Paradigma dan model penelitian komunikasi”*, (Jakarta. PT. Bumi Aksara 2014).
- Syafruddin Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, hal. 22;
- Manan Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1 Mei 2000, hal. 1-2. Sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, 2003, op. *Cip*, hal. 72;
- Manan Bagir. *“DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 baru”* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *“Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Cet. 1”*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).
- Effendi Sofian, *“Membangun Budaya Demokrasi Untuk Good Governance”*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselelenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005; pdf
- Muttaqin Entol Zaenal, *“Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan”*(Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018)

Asmara Galang, 2015, Penguatan Kelembagaan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, *Halrev Journal of Law*, 1(3): 357-370

Phillipus Hadjon M. *Tentang Wewenang*, makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 20;

Palguna I Dewa gede, “*Susunan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group

P. D I Made, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori*” *Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group)

Farida Indrati Maria “*Ilmu Perundang-Undangan*”. , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 65;

Suny Ismail, “*Pembagian Kekuasaan Negara*”, *Cet. Ke-2*. (Jakarta: Aksara Baru, 1978).

Asshaddiqie Jimly, “*Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Asshiddiqie Jimly, “*Hukum Tata Negara Jilid I*”, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Asshiddiqie Jimly, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press*”, Jakarta, 2005.

- Asshiddiqie Jimly, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*," (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Asshiddiqie Jimly, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*," (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Asshiddiqie Jimly, "*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Asshiddiqie Jimly, 2005, "*Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*", Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Subagyo Jogo, "*Metode penelitian dalam teori dan praktik*", (Jakarta. PT. Rineka Cipta 1994).
- Putri John Pieris dan Aryanti Baramuli, "*Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Kantaprawira, *Hukum dan kekuasaan, makalah*, Yogyakarta: Universiatas Islam Indonesia, hal.37-38.
- Kelsen, Hans, 2013, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Bandung; Nusa Media, cet. VIII*, hal. 360
- LAN-BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), hal. 2;
- Yusuf M.. "*Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Ridho M. Zainor "*Pengantar Ilmu Politik*" (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018)

Majelis Permusyawaratan Rakyat “*Panduan Pemasyarakatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*”.

Budiardjo Miriam, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Cet Ke-6, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Budihardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 35;

MD Moh. Mahfud, “*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Cet. II*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).

MD Moh. Mahfud, “*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*”, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003).

Marzuki Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”.

Hadjon Philipus M., “*Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR*”.

Hadjon Philipus M., “*Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*”, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1992.

Sedarmayanti, *Good Governance; Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Yang Efektif Dan Efisien Melalui Rekontruksi Dan Pemberdayaan*, Bagian Pertama, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, hal.2;

Sekjen DPD RI, “*Sekilas Mengenal dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

- Gunawan Setiardja, A., *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 52;
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta; Rajawali Press, hal.260;
- Sri Mamudji & Soerjon Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatifn (Suatu Tujuan Singkat*”) (Jakarta Rajawali Pers) 2001.
- Soemantri Sri “*Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*”.
- Tutik Titik Triwulan, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*”, (Jakarta: Kencana, 2011).

JURNAL

- Ash Shidiq Maulana Ilham, “*Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Legislasi Bikameral Di Indonesia*”.
- Wasti Ryan Muthiara, “*Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47 No.4 Oktober-Desember 2017*.”
- Rosidi Ahmad, “*Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indoensia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Vol III Nomor 8 Agustus 2015.
- Nurbaningsih Enny, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Modal Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang, *Mimbar*, Volume 27 Nomor 1, Februari 2015.

Mulyosudarmo Suwoto, *“Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggung Jawaban Kekuasaan)”*, (Surabaya: Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, 1990).

Hanum Faridah *“Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Pembentukan dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam konteks Fiqih Siyasah”*.

Soebardjo *“Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia”* Jurnal Hukum No. 1 VOL. 14 Januari 2007.

WEBSITE

Jimly Asshiddiqie, *“Konsep Negara Hukum, dalam (Artikel Hukum) “Gagasan Hukum Indonesia”*, (www.docudesk.com).

[https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/penguatan-kewenangan dewan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraandi Indonesia/](https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/penguatan-kewenangan-dewan-perwakilan-daerah-dalam-sistem-ketatanegaraandi-indonesia/)

[http: www. Sonny- tobelo. blogspot. com/ 2011/01/ teori-kewenangan. html](http://www.Sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html), diunggah pada hari Sabtu, 08 Januari 2011, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 19:01 WIB;